

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019

Mariana Ulfa*, Abd. Wahid Mahsuni, Junaidi *****

Email : Marianaulva76@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of good corporate governance with the variables of the board of directors, board of commissioners, audit committee, sharia supervisory board, and institutional ownership on the financial performance of Islamic banking organizations. By using a sample of Islamic banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the study period 2016-2019, the results of this study indicate that there is no influence between the board of directors, the board of commissioners, the audit committee, the sharia supervisory board on financial performance as measured by using Return On. Asset.

Keywords: *Good Corporate Governance, Islamic Banking Companies, Return On Assets.*

PENDAHULUAN

Good corporate governance (GCG) yaitu merupakan elemen untuk mendukung para dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam suatu perusahaan *Good corporate governance* (GCG) sebagai sistem pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk meminimalisasi risiko guna meningkatkan tujuan bisnisnya dan akuntabilitas perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dewan pengawas syariah, kepemilikan *institusional*, dan lain-lain untuk mewujudkan GCG perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan sangat diperlukan guna membangun kepercayaan publik dan internasional yang merupakan prasyarat untuk perkembangan perusahaan perbankan yang normal dan sehat. Bank Internasional (BIS) merupakan lembaga yang mengkaji perlunya penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan telah menerbitkan “Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)”. Dalam sebuah lembaga keuangan perbankan syariah prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dikenal dengan TARIF, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* yang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga keuangan perbankan syariah tersebut.

Novitasari (2017), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan perbankan dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan institusional.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi ini memberikan wawasan analitis untuk mempelajari pengaruh hubungan *agent* dan *principal* atau *principal* dan *principal*. Teori ini muncul ketika pemisahan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan, terutama pada perusahaan *modern* besar. Pengertian *principal* dalam teori agensi adalah pihak yang menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk dikembangkan oleh pihak lain.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah peraturan dan standar organisasi dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk mengatur perilaku pemilik, direktur maupun manajer perusahaan, dan rincian pembagian tugas, wewenang, serta pertanggungjawaban pada para investor dan kreditur. Tata kelola dalam Bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

Prinsip Good Corporate Governance

Dalam *corporate governance* ada lima prinsip-prinsip antara lain (Effendi, 2016):

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Transparansi (*Transparency*) membuat informasi tentang status keuangan, kinerja operasional, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan tepat waktu, terbuka, jelas, dan dapat dibandingkan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan prinsip pengelolaan informasi dan tanggung jawab yang disampaikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, dapat menjelaskan dan mendukung pekerjaan yang dilakukan untuk memastikan keseimbangan kepentingan antara manajemen dan investor yang dapat diawasi oleh dewan komisaris. Dalam hal ini dewan komisaris memberikan pengawasan terhadap pemegang saham.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku saat mengelola perusahaan, yang merupakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan guna menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan mengusahakan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pada lingkup peraturan yang berlaku dan etika bisnis yang baik.
4. **Independensi (*Independency*)**
Prinsip dasar independensi merupakan suatu perusahaan harus dapat melayani dengan baik dan menjadi syarat yang diperlukan untuk pengambilan suatu kebijakan untuk perusahaan tersebut. Setiap instansi menjalankan tugas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*. Kecuali instansi perusahaan, tidak ada pihak yang mengganggu pengelolaan perusahaan.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
Prinsip dasar dalam kewajaran (*Fairness*) adalah perlakuan yang adil dan setara dalam mencapai hak *stakeholder* berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.

Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu tindakan penting untuk menciptakan suatu kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional jangka panjang yang lebih kuat. Tujuan dan manfaat tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi biaya agensi, biaya akibat penyalahgunaan kekuasaan, atau dalam bentuk biaya pengawasan untuk mencegah masalah.
2. Mengurangi biaya modal karena pengelolaan yang baik, sehingga dapat meminimalkan risiko.
3. Dalam jangka panjang, memaksimalkan nilai saham suatu perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik.
4. Mendorong pengelolaan bank yang profesional, transparan dan efektif.

5. Meningkatkan anggota komite, anggota dewan dan pemegang saham untuk mengambil keputusan dan langkah atas dasar semangat kerja yang tinggi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
6. Menjaga kelangsungan operasi perusahaan.

Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) adalah aturan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengambil keputusan dan pihak yang mengontrol dan memantau keputusan yang diambil. Fungsi dari mekanisme ini diyakini dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pengelola dan investor. Konflik ini memungkinkan klien untuk melakukan pengawasan manajemen untuk meminimalkan penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Dari berbagai perspektif, mekanisme GCG yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini yaitu dewan direksi, komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan *institusional*.

1. Dewan Direksi

Orang yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola suatu perusahaan. Dewan direksi akan menentukan kebijakan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam UUPT, anggaran dasar, dan RUPS yang telah ditentukan untuk dewan direksi dalam mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dan dibawah pengawasan dewan komisaris (Iriyanto 2018).

2. Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara keseluruhan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada dewan direksi. Dalam hal RUPS mengangkat atau mengganti anggota, rekomendasi komite remunerasi dan nominasi harus memperhatikan RUPS. Apabila rekomendasi bertentangan dengan kepentingan, rekomendasi tersebut harus diungkapkan kepada RUPS.

3. Komite Audit

Komite audit adalah organisasi independen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja audit internal untuk menilai kesesuaian pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan. Biasanya, anggota komite audit terdiri dari anggota dewan komisaris independen yang memiliki keahlian akuntansi dan keahlian dalam bidang perbankan syariah.

4. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) yaitu dewan yang bertugas memberi saran dan nasehat pada direksi, dan mengawasi aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadi anggota dewan pengawas syariah harus mematuhi Peraturan Perbankan Indonesia yang ditetapkan oleh RUPS.

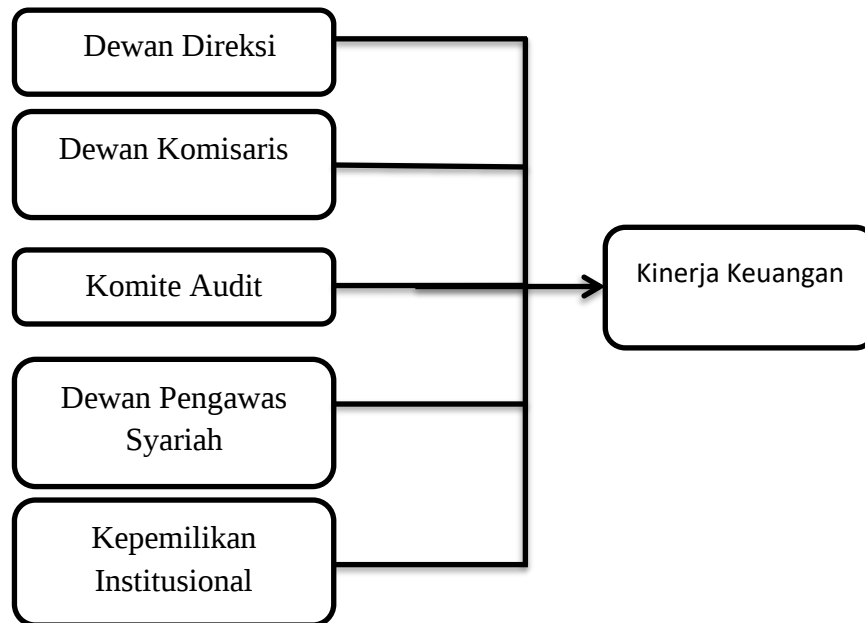
5. Kepemilikan Institusional

Presentase kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor *institusional* seperti bank, perusahaan investasi, pemerintah, asuransi maupun kepemilikan lembaga lain sebagainya. Investor *institusional* mempunyai kemampuan baik untuk mengawasi suatu tindakan manajemen daripada investor individual. Investor *institusional* tidak mudah dimanipulasi dan dipercaya oleh manajemen (Iriyanto, 2018).

Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut perdani (2016) kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan mengukur tingkat pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba dan jumlah karyawan perusahaan. Evaluasi kinerja digunakan untuk meningkatkan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019 dan dapat diakses di www.idx.co.id.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Pada metode tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai literatur dan membaca isi *annual report* perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di BEI adalah sejumlah 14, namun tidak semua perusahaan memenuhi kriteria yang tercantum dalam penelitian ini. Terdapat 1 perusahaan yang pernah tidak menginformasikan tentang *corporate governance*, status kepemilikan, dan rasio keuangan dalam laporan tahunan (*annual report*). Untuk itu, sampel yang diperoleh pada penelitian ini 13 perusahaan dengan jumlah data penelitian sebanyak 52 data (13 perusahaan x 4 tahun).

Pembahasan

1. Hasil uji normalitas

**Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,42030460
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,092
	Negative	-,087
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.3 nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1.106 dengan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,173 sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal.

2. Hasil uji asumsi klasik

a. Uji autokorelasi

**Tabel 4.4 Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	,393 ^a	,154	,056	1,50061	,154	1,567	5	43	,190	,593

a. Predictors: (Constant), Ln_X1e, Ln_X1d, X1c, Ln_X1b, X1a

b. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai *Durbin Watson* adalah 0,593. Dengan signifikan 0,05, sampel yang digunakan 52 (n) dan variabel independen 5 (k :6)., dapat dinilai dL : 1,3512 dan dL : 1,7694. Nilai DW 0,593 kurang dari nilai dL yaitu sebesar 1,3512. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif jika koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol. Hal ini terjadi jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dl).

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,245	1,231		-,199	,843		
	X1a	,272	,219	,246	1,242	,221	,500	1,999
	X1c	,266	,185	,212	1,436	,158	,900	1,111
	Ln_X1b	-1,908	,988	-,379	-1,932	,060	,510	1,962
	Ln_X1d	,214	,824	,040	,260	,796	,842	1,188
	Ln_X1e	16,594	10,856	,227	1,528	,134	,894	1,119

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Pada tabel 4.5 semua variabel nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,245	1,231		-,199	,843		
	X1a	,272	,219	,246	1,242	,221	,500	1,999
	X1c	,266	,185	,212	1,436	,158	,900	1,111
	Ln_X1b	-1,908	,988	-,379	-1,932	,060	,510	1,962
	Ln_X1d	,214	,824	,040	,260	,796	,842	1,188
	Ln_X1e	16,594	10,856	,227	1,528	,134	,894	1,119

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan uji *glejser* pada tabel 4.6 menunjukkan pada dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan institusional tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sig > 0,05.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,245	1,231		-,199	,843		
	X1a	,272	,219	,246	1,242	,221	,500	1,999
	X1c	,266	,185	,212	1,436	,158	,900	1,111
	Ln_X1b	-1,908	,988	-,379	-1,932	,060	,510	1,962
	Ln_X1d	,214	,824	,040	,260	,796	,842	1,188
	Ln_X1e	16,594	10,856	,227	1,528	,134	,894	1,119

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.7 persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_{1a} + b_2X_{1b} + b_3X_{1c} + b_4X_{1d} + b_5X_{1e} + e$$

$$Y = -0,245 + 0,272 X_{1a} + (-1,908) X_{1b} + 0,266 X_{1c} + 0,214 X_{1d} + 16,594 X_{1e} + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

**Tabel 4.8 Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,645	5	3,529	1,567	,190 ^b
	Residual	96,829	43	2,252		
	Total	114,473	48			

a. Dependent Variable: Ln_Y

b. Predictors: (Constant), Ln_X1e, Ln_X1d, X1c, Ln_X1b, X1a

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 8,372 dan nilai sig 0,190 > $\alpha = 0,05$. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan *institusional* secara simultan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

b. Uji Determinasi

**Tabel 4.9 Uji R²
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,393 ^a	,154	,056	1,50061	,154	1,567	5	43	,190	,593

a. Predictors: (Constant), Ln_X1e, Ln_X1d, X1c, Ln_X1b, X1a

b. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,056. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan *institusional* berpengaruh sebesar 5,6% terhadap kinerja keuangan. Sedangkan 94,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

c. Uji Parsial

**Tabel 4.10 Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,245	1,231		-,199	,843		
	X1a	,272	,219	,246	1,242	,221	,500	1,999
	X1c	,266	,185	,212	1,436	,158	,900	1,111
	Ln_X1b	-1,908	,988	-,379	-1,932	,060	,510	1,962
	Ln_X1d	,214	,824	,040	,260	,796	,842	1,188
	Ln_X1e	16,594	10,856	,227	1,528	,134	,894	1,119

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS 2021

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai $t_{hitung} = 1,242$ dengan nilai signifikan $0,221$. Nilai $sig\ 0,221 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa $H1a$ ditolak yang berarti bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini terbukti apabila kuantitas dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga dalam suatu perusahaan perbankan syariah harus lebih memperhatikan kualitas dewan direksi seperti *skill*, kompetensi, dan profesionalitas yang dimiliki oleh dewan direksi tersebut.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai $t_{hitung} = -1,932$ dengan nilai signifikan $0,060$. Nilai $sig\ 0,060 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa $H1b$ ditolak yang berarti bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam sebuah perusahaan perbankan syariah agar kinerja keuangan meningkat, dewan komisaris harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai $t_{hitung} = 1,436$ dengan nilai signifikan $0,158$. Nilai $sig\ 0,158 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa $H1c$ ditolak yang berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemampuan yang dimiliki oleh komite audit adalah dalam bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang baik harus lebih memperhatikan kualitas.

4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai $t_{hitung} = 0,260$ dengan nilai signifikan $0,796$. Nilai $sig\ 0,796 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa $H1d$ ditolak yang berarti bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini DPS tidak berpengaruh disebabkan karena masih banyak anggota dewan pengawas syariah yang mengerti tentang hukum syariah dan belum mengerti mengenai teknis perbankan dan juga kurang dalam memahami ilmu ekonomi keuangan islam seperti akuntansi, sehingga peran dan pengawasan lainnya kurang optimal.

5. Pengaruh Kepemilikan *Institusional* Terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai $t_{hitung} = 1,528$ dengan nilai signifikan $0,134$. Nilai $sig\ 0,134 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa $H1e$ ditolak yang berarti bahwa kepemilikan *institusional* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan tinggi rendahnya kepemilikan institusional yang menyebabkan proses monitoring terhadap manajer perusahaan perbankan syariah kurang efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan *institusional* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan..
2. Secara parsial bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah dan kepemilikan *institusional* tidak mempengaruhi pada kinerja keuangan.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan *institusional*.
3. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan tahun 2016-2019

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia tetapi juga bisa menggunakan perusahaan lain.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti kepemilikan manajerial, komite remunerasi, dan lain-lain.
3. Dalam penelitian selanjut diharapkan dapat menggunakan tahun yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Muh.Arief.2016. *Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eksandy, Arry. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah 'ah Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Fransisca, Vinnda. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)(Skripsi)*. Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga
- Honi, Saerang, dan Tulung. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Iriyanto, Ihsan Nur. (2018). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Negara-Negara Asia Tenggara*. Universitas Islam Indonesia.
- Novitasari, Diah Putri. 2017. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016)(E-jurnal Akuntansi)*. Malang : Universitas Islam Malang
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah*.
- Perdani, V.M.(2017). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Purnamasari, Novi. (2020). *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Konvensional Yang Terdapat Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*. Universitas Islam Malang.
- *) **Mariana Ulfa** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) **Abd. Wahid Mahsuni** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.
- ***) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.